

---

## SOSIALISASI PEREMAJAAN DATA PEGAWAI MELALUI APLIKASI SISTEM INFORMASI ASN (SI-ASN BKN)

**Zet Abdullah<sup>1</sup>, Yofitri Heny Wahyuli<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Study Psikologi, STISIP Widya Dharma Palembang

<sup>2</sup>Program Studi Administrasi Publik. Dispora Kota Palembang

<sup>1\*</sup>zetabd354@gmail.com, <sup>2</sup>yofitriheny wahyuli@gmail.com

**Abstrak:** Sosialisasi ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan sosialisasi peremajaan data pegawai melalui aplikasi SI-ASN BKN. Tujuan spesifik meliputi: (1) memberikan pemahaman kepada ASN mengenai urgensi dan prosedur peremajaan data mandiri; (2) memastikan partisipasi aktif seluruh ASN dalam proses pemutakhiran data; dan (3) meningkatkan akurasi serta validitas database kepegawaian di instansi terkait. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan menggunakan metode ceramah, demonstrasi langsung penggunaan aplikasi SI-ASN/MySAPK, dan sesi tanya jawab (studi kasus) yang melibatkan seluruh perwakilan pegawai/administrator kepegawaian di unit kerja. Peserta diberikan panduan teknis dan didampingi dalam mengakses serta menginput/memperbarui data profil kepegawaian mereka, yang mencakup data utama, riwayat pendidikan, jabatan, pangkat, dan dokumen pendukung lainnya. Hasil sosialisasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran ASN terhadap pentingnya data yang akurat. Sebagian besar peserta telah berhasil melakukan peremajaan data awal melalui aplikasi, meskipun terdapat beberapa tantangan teknis seperti kendala akses jaringan atau ketidaklengkapan dokumen pendukung yang memerlukan tindak lanjut. Kegiatan ini berkontribusi pada percepatan terwujudnya "Satu Data ASN" di lingkungan instansi. Simpulan dari Sosialisasi peremajaan data pegawai melalui aplikasi SI-ASN BKN merupakan langkah krusial dalam upaya digitalisasi manajemen ASN. Keberhasilan inisiatif ini sangat bergantung pada komitmen pimpinan instansi dan partisipasi aktif seluruh ASN untuk terus memutakhirkan data mereka secara mandiri dan berkala.

**Kata Kunci:** SI-ASN BKN, Peremajaan Data Pegawai, Aplikasi Sistem Informasi ASN, Data Kepegawaian, Pemutakhiran Data Mandiri (PDM)

**Abstract:** This sosialization aims to describe the implementation of employee data renewal socialization through the BKN SI-ASN application. Specific objectives include: (1) providing ASN with an understanding of the urgency and procedures for independent data renewal; (2) ensuring the active participation of all ASN in the data updating process; and (3) improving the accuracy and validity of the personnel database at the relevant agency. The socialization activities were carried out using lecture methods, live demonstrations of the use of the SI-ASN/MySAPK application, and question-and-answer sessions (case studies) involving all employee representatives/personnel administrators in the work unit. Participants were provided with technical guidance and assistance in accessing and inputting/updating their employee profile data, which includes primary data, educational history, position, rank, and other supporting documents. The results of the socialization showed an increase in ASN understanding and awareness of the importance of accurate data. Most participants have successfully carried out initial data rejuvenation through the application, although there were several technical challenges such as network access constraints or incomplete supporting documents that required follow-up. This activity contributed to the acceleration of the realization of "One ASN Data" within the agency environment. The conclusion from the socialization of employee data rejuvenation through the BKN SI-ASN application is a crucial step in the effort to digitize ASN management. The success of this initiative is highly dependent on the commitment of agency leaders and the active participation of all ASN to continue updating their data independently and regularly.

**Keywords:** BKN ASN SI, Employee Data Rejuvenation, ASN Information System Application, Employee Data, Independent Data Update (PDM)

**Riwayat Artikel**  
23/11/2025

Diserahkan : 13/11/2025 Diterima : 23/11/2025 Dipublikasikan :

### Pendahuluan

Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) sudah digunakan sejak tahun 2022. SIASN merupakan platform berbasis web yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). SIASN berfungsi untuk mengintegrasikan data Aparatur Sipil Negara (ASN)

secara nasional. Data kepegawaian tersebut meliputi seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah.

Tujuan SIASN adalah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam manajemen kepegawaian. Beberapa layanan yang tersedia di SIASN, di antaranya: Peremajaan data, Pencantuman gelar, Kenaikan pangkat, Mutasi PNS, Pensiun. SIASN juga menerapkan digital signature sehingga proses layanan pengusulan kepegawaian tidak memakan waktu yang lama.

Peremajaan data pegawai di SIASN (Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara) dilakukan untuk memastikan data yang digunakan akurat, terkini, dan terpadu. Tujuan peremajaan data pegawai di SIASN: Menciptakan interoperabilitas data, Memastikan data pegawai terkini, Memastikan data pegawai berkualitas baik.

Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) memiliki banyak manfaat, di antaranya:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen kepegawaian
2. Meningkatkan efisiensi dan kecepatan pelayanan administrasi kepegawaian
3. Memudahkan pengawasan kinerja pegawai
4. Memudahkan pengambilan keputusan yang transparan
5. Memudahkan memantau proses layanan kepegawaian
6. Memudahkan pengusulan kepegawaian berbasis digital
7. Memudahkan pemutakhiran data kepegawaian

Beberapa layanan yang dapat dilakukan melalui SIASN, antara lain:

1. Perencanaan
2. Perekutan dan seleksi
3. Pengembangan kapasitas
4. Penilaian kinerja dan reward
5. Promosi, rotasi, dan karier
6. Purna bakti

Cara kerja operator SIASN dan approval adalah sebagai berikut:

1. Instansi mengajukan usulan pemutakhiran data melalui aplikasi SIASN
2. Bidang Informasi Kepegawaian menerima permohonan dan melakukan pengecekan kesesuaian dokumen pendukung
3. Jika dokumen pendukung sudah sesuai, maka akan dilakukan proses pemutakhiran data
4. PIC yang menangani instansi tersebut akan melakukan approval terhadap usulan peremajaan yang diajukan

SIMPEG KKP adalah Sistem Informasi Manajemen Pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan. SIMPEG KKP merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk menunjang proses administrasi kepegawaian di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tujuan dari SIMPEG adalah untuk membangun manajemen sumber daya aparatur yang terintegrasi, terpadu, dan reliable. SIMPEG dapat menampung, mengolah, menyimpan, menemukan kembali, dan mendistribusikan data pegawai.

Tidak mudah menyajikan administrasi kepegawaian negara secara utuh dalam sebuah buku karena persoalan hukum yang terkait dengan kegiatan pemerintahan dinamikanya sangat terlihat, terutama peraturan yang selalu berubah-ubah. Oleh karena itu, buku ini lebih banyak menekankan aspek teoretis daripada hukum yang berkaitan dengan kepegawaian negara. Kajian

Administrasi Kepegawaian Negara menyangkut berbagai hal, di antaranya kebijakan negara mengangkat pegawai, menggaji pegawai, dan berbagai peningkatan karier

pegawai serta kinerjanya yang wajib dilaksanakan sebaik mungkin. Dengan mempelajari administrasi kepegawaian negara, kita sekaligus mempelajari (Anggara, S. 2016).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan SAPK di Pemerintah Kabupaten Fakfak telah berjalan namun belum optimal. Untuk layanan pengadaan, NIP frontline dan layanan pensiun telah terlaksana dengan baik, namun promosi jabatan belum memberikan dampak yang diharapkan. PNS yang dipromosikan untuk menerima SK Kenpat melebihi batas waktu periode Kenpat. Begitu pula peremajaan data, masih terdapat PNS yang data SAPK, data DUK kepegawaian tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga memperlambat proses pelayanan. Faktor penghambat implementasi SAPK antara lain: belum tersedianya sumber daya dan aparatur yang memiliki keahlian sebagai analisis kepegawaian untuk melakukan validasi data, serta jaringan internet yang mengalami gangguan. Sedangkan faktor pendorong antara lain: faktor komunikasi: adanya kebijakan tertulis dan kejelasan penyampaian pesan. faktor sumber daya: tersedianya sumber daya aparatur, kemampuan aparatur sebagai operator komputer, dan semuanya menerima kebijakan SAPK. Serta upaya optimalisasi implementasi kebijakan SAPK antara lain: Sosialisasi dalam bentuk pertemuan. Termasuk staf pelatihan analis personalia dan semua personil yang mengoperasikan SAPK (Asyik, M. F., Sumaryadi, I. N., & Mulyati, D. 2021). Penelitian ini berfokus pada Implementasi E-Government melalui Sistem Aplikasi Layanan Ketenagakerjaan (SAPK Online): (1). Untuk mengetahui bagaimana implementasi E-Government dengan menggunakan Sistem Aplikasi Layanan Ketenagakerjaan (SAPK Online) di Badan Kepegawaian Daerah Pekanbaru. (2). Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat implementasi E-Government dengan menggunakan Sistem Aplikasi Layanan Ketenagakerjaan (SAPK Online) di Badan Kepegawaian Daerah Pekanbaru (Sufi, W., & Herlinda, D. 2017).

Hasil penelitian ini diketahui bahwa: 1) peran aktif Dinsos dalam pemberdayaan anak jalanan yaitu melaksanakan rencana kerja tahunan dan program sesuai peraturan Bupati Kabupaten Magetan. Peran partisipatifnya yaitu melaksanakan program pemberdayaan menyesuaikan dengan lembaga pemerintah yang terkait; 2) upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Magetan dalam pemberdayaan ada dua cara: (a) Assesment merupakan tindakan yang dilakukan dengan mengadakan tinjauan lapangan dengan melihat kondisi anak dengan keluarganya dan (b) Rujuk merupakan tindakan setelah melakukan assesment, ada dua bentuk rujukan yang dilakukan. Pertama rujukan keluarga, jika ada keluarga dan memiliki hubungan yang baik maka oleh Dinsos dikembalikan kepada orangtua anak jalanan tersebut tapi ketika keadaan keluarga dalam keadaan yang broken home akan ditampung dan dikirim ke panti; (3) Kendala Dinas sosial di Kabupaten Magetan dalam pemberdayaan terhadap anak jalan yaitu yang anak kesulitan dalam mengubah pola pikir yang biasa dilakukan dengan perilaku bebas untuk masuk ke dunia yang memerlukan aturan dan tata tertib dimasyarakat (Wijayanto, H. D. 2019).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk koordinasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Binjai dalam upaya penanggulangan bencana banjir adalah bentuk koordinasi internal dan ekternal. Koordinasi tersebut dilaksanakan baik pada masa prabencana, saat terjadi bencana maupun pada masa pasca bencana. Koordinasi internal lebih banyak dilakukan terhadap aparatur yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Binjai sendiri, sedangkan koordinasi ekternal dilakukan terhadap pihak-pihak di luar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Binjai yang berkaitan dengan tugas bencana banjir. Hambatan dalam penyelenggaraan Koordinasi yaitu : Sumber daya manusia yang tidak berkompeten dalam bidangnya (basic penanggulangan bencana) padahal Kota Binjai mempunyai organisasi

yang berkompeten di bidangnya. Koordinasi yang dibangun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku badan yang mengkomandoi organisasi lain namun koordinasi baru terbangun ketika bencana terjadi. Sarana dan prasarana yang kurang memadai dikarenakan masih kurangnya bantuan dari pemerintah setempat (Yani,A.2017).

## **Metode**

Metode penelitian untuk sosialisasi peremajaan data melalui aplikasi SI-ASN BKN menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini akan melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dengan informan kunci (seperti pengelola data kepegawaian dan aparatur sipil negara) dan pengumpulan data sekunder dari dokumen-dokumen terkait, seperti peraturan, buku petunjuk aplikasi, dan data-data sebelumnya. Tahapan analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memahami proses sosialisasi, respon peserta, serta efektivitas penerapan aplikasi. Subjek dari sosialisasi penelitian ini adalah Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Palembang. Informan ini Terdiri dari pihak-pihak yang terlibat langsung, seperti Pengelola/administrator SI-ASN di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Palembang, Pegawai ASN sebagai pengguna aplikasi MySAPK/SI-ASN, Pimpinan instansi terkait.

## **Hasil dan Pembahasan**

Hasil Sosialisasi peremajaan data pegawai melalui aplikasi SI-ASN adalah peningkatan akurasi data, pemahaman pentingnya data yang mutakhir, dan proses pembaruan data yang harus dilakukan secara mandiri oleh setiap ASN. Sosialisasi ini menekankan bahwa ASN harus proaktif memeriksa dan memperbarui data diri di SI-ASN, termasuk data utama seperti NIP dan tanggal lahir, data jabatan, angka kredit, dan SKP, dengan mengunggah dokumen pendukung yang sesuai. Hasil dan pembahasan utama dari kegiatan sosialisasi ini mencakup beberapa aspek krusial:

Hasil Sosialisasi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kesadaran data: ASN diharapkan lebih sadar dan bertanggung jawab atas akurasi data pribadi mereka.
2. Data yang akurat dan terintegrasi: Tujuan utamanya adalah memiliki data ASN yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi secara nasional untuk mendukung manajemen ASN yang lebih baik
3. Layanan kepegawaian yang lebih efisien: Dengan data yang valid, diharapkan layanan kepegawaian menjadi lebih cepat dan mudah.
4. Digitalisasi layanan: Pelaksanaan program Satu Data Indonesia melalui aplikasi SI-ASN, yang bertujuan untuk layanan berbasis paperless dan modern.

Pembahasan/poin penting dalam peremajaan data adalah:

Tanggung jawab ASN: Pegawai tidak bisa hanya bergantung pada admin, tetapi wajib melakukan pengecekan dan pembaruan data secara mandiri.

Proses pengecekan dan pembaruan:

1. Pengecekan dilakukan langsung melalui akun SI-ASN.
2. Beberapa area yang perlu dicek adalah: Data Utama (NIP, nama, tanggal lahir, email), Riwayat Jabatan, Angka Kredit, dan SKP.

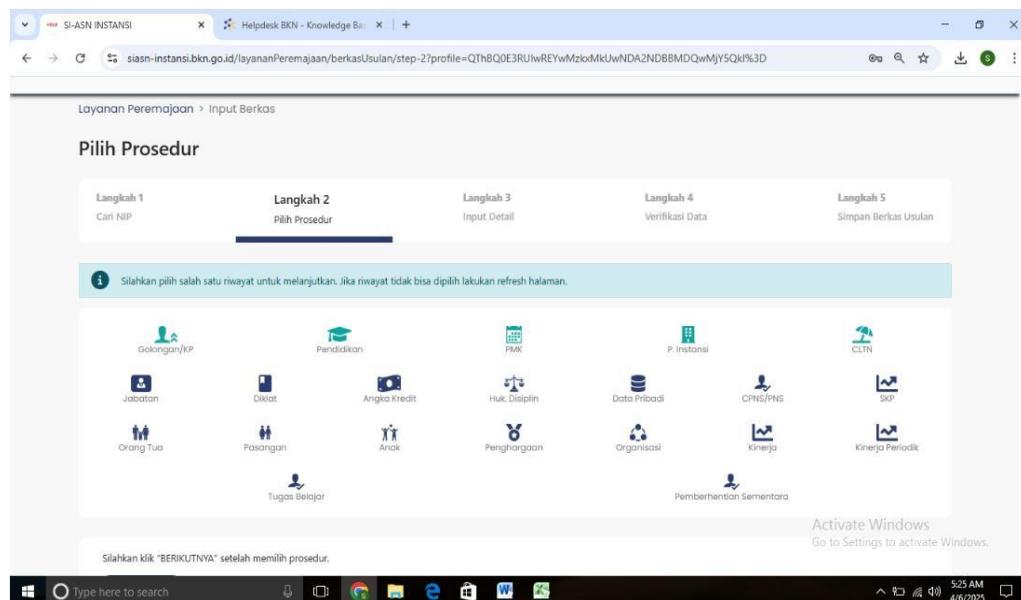
Jika ada perbedaan data yang signifikan, ASN harus mengajukan perbaikan melalui fitur yang tersedia di SI-ASN, dengan menyertakan data yang benar dan dokumen pendukung.

1. Dokumen pendukung: ASN harus siap mengunggah dokumen yang akurat sesuai dengan permintaan untuk memvalidasi data yang diperbarui.
2. Pengecekan terakhir: Sebelum menyimpan, ASN harus melakukan pengecekan ulang untuk memastikan semua data dan dokumen sudah terisi dan benar, ditandai dengan centang hijau
3. Pentingnya rekonsiliasi data: Proses ini juga merupakan bentuk rekonsiliasi data yang penting bagi diri ASN, tim, dan organisasi

Aktifitas Operator SIASN. Aktifitas Operator SIASN Satuan kerja SUPM Dispora Kota Palembang, meliputi: Pemeliharaan dan Pemutakhiran Data ASN

Pada Bulan Agustus 2025 pemuktahiran data ASN yaitu mengupdate data pegawai yang akan naik pangkat periode Oktober 2025;

1. Memastikan data ASN (Nama, NIP, Jabatan, dll) di SIASN akurat dan terkini.
2. Melakukan peremajaan data ASN sesuai dengan perubahan yang terjadi.
3. Menginput usulan kenaikan pangkat, promosi, rotasi, dan pensiun ASN.
4. Menginput usulan perbaikan data ASN.



**Gambar 1.** Aplikasi Peremajaan data pegawai

Riwayat dengan icon berwarna hijau tosca adalah layanan yang melalui proses persetujuan di level instansi kemudian usulan akan masuk ke inbox BKN untuk kemudian dilakukan proses verifikasi dan persetujuan, sedangkan riwayat dengan icon berwarna biru tua adalah layanan yang proses verifikasi dan persetujuan selesai di level instansi.

**Tabel 1.** Layanan peremajaan data pegawai

<b>Layanan Peremajaan</b>	
Persetujuan sampai BKN	Persetujuan selesai di Instansi
1. Golongan/KP	1. Jabatan
2. Pendidikan	2. Diklat
3. Pencantuman Gelar	3. Angka Kredit
4. Peninjauan Masa Kerja (PMK)	4. Hukuman Disiplin
5. Pengajuan PMK	5. Data Pribadi

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 6. Pindah Instansi                          | 6. CPNS/PNS                 |
| 7. Cuti di Luar Tanggungan Negara<br>(CLTN) | 7. SKP                      |
|   | 8. Orang Tua                |
|   | 9. Pasangan                 |
|   | 10. Anak                    |
|   | 11. Penghargaan             |
|   | 12. Organisasi              |
|   | 13. Kinerja                 |
|   | 14. Kinerja Periodik        |
|   | 15. Tugas Belajar           |
|   | 16. Pemberhentian Sementara |

Aplikasi Epegawai KKP merupakan sebuah aplikasi database yang berbasis web online atau web base untuk mengelola Data Pribadi, Data Riwayat Hidup, Data Kepegawaian, Data Presensi, Data SKP dan Data Logbook. Aplikasi e-Pegawai bertujuan agar tercapainya kelancaran informasi secara elektronik sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja serta administrasi perkantoran lingkup Dinas Kepeaan dan Olaraga Kota Palembang.

Selama bulan Agustus 2025 Kegiatan Sosialisasi Peremajaan Data Pegawai Melalui Aplikasi Sistem Informasi Asn (Si-Asn Bkn) Dispora Kota Palembang dilaksanakan sesuai dengan berbagai kebutuhan data yang tertera pada aplikasi SIMPEG meliputi :

1. Update Data dasar
2. Update data Kepangkatan
3. Update data Anak
4. Update data Pegawai Kontrak

Adapun Foto Kegiatan Aktifitas Peremajaan Data Pegawai Melalui Aplikasi Sistem Informasi Asn (Si-Asn Bkn).



**Gambar 1.** Penjelasan mengenai Peremajaan data pegawai dari BKPSDM Bagian Kepegawaian



**Gambar 2** Penjelasan dari Kepala BKPSDM mengenai Aplikasi Sistem Informasi ASN



**Gambar 3.** Penjelasan dari Narasumber



**Gambar 4.** Foto bersama dengan peserta ASN

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari sosialisasi peremajaan data pegawai melalui aplikasi Sistem Informasi ASN (SI-ASN BKN) maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Tujuan Utama: Meningkatkan akurasi, validitas, dan keterpaduan data ASN secara nasional untuk mewujudkan "Satu Data ASN" di Indonesia. Data yang akurat ini sangat penting untuk mendukung layanan kepegawaian yang cepat, tepat, dan profesional, seperti kenaikan pangkat, usulan pensiun, dan manajemen SDM secara keseluruhan. 2) Proses Digitalisasi: Peremajaan data merupakan bagian dari upaya percepatan digitalisasi arsip kepegawaian ASN, yang dilakukan melalui platform terintegrasi (SI-ASN) dan dapat diakses mandiri oleh pegawai melalui aplikasi MyASN (sebelumnya MySAPK) atau melalui admin instansi. 3) Peran ASN dan Instansi: Sosialisasi ini menekankan pentingnya peran aktif setiap ASN untuk melakukan pemutakhiran data pribadi mereka secara mandiri dan memastikan kelengkapan dokumen pendukung yang diunggah. Instansi (melalui BKD/BKPSDM) bertindak sebagai unit verifikasi yang akan memvalidasi data yang diajukan oleh ASN. 4) Data yang Diperbarui: Data yang diremajakan mencakup data utama, riwayat (seperti riwayat keluarga, pendidikan, jabatan, dan penghargaan), serta informasi kontak pribadi. 5) Manfaat: Integrasi data ini mempermudah proses administrasi kepegawaian, mengurangi duplikasi dan kesalahan input data, serta memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data yang lebih baik bagi pemangku kepentingan. Secara ringkas, sosialisasi ini merupakan langkah strategis BKN dan instansi pemerintah daerah untuk memastikan data kepegawaian selalu terbarukan, valid, dan terintegrasi dalam satu sistem digital untuk mendukung reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun saran dari sosialisasi ini Perlu dilakukan pembaruan data secara berkala dan rutin untuk memastikan data SIASN selalu akurat dan terkini dan sosialisasi yang efektif mengenai SIASN dan manfaatnya kepada seluruh ASN

## Referensi

- Anggara, Sahya. (2016). Administrasi Kepegawaian Negara. E-Book. Diakses dari <http://digilib.uinsgd.ac.id/11015/1/1.%20BUKU%20ADMINISTRASI%20KEPEGAWAIAN%20NEGARA.pdf>
- Asyik, M. F., Sumaryadi, I. N., & Mulyati, D. (2021). Implementasi Kebijakan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Osapkodi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Implementasi Kebijakan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Osapkodi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, 13(1), 1-12. <Http://Ejournal.Goacademica.Com/Index.Php/Jv/Article/View/369>
- Badan Keuangan Negara, (2020). Instansi Pemerintah Wajib Mutakhirkan Data Pegawai melalui SI-ASN. Jakarta. Diakses dari <https://www.bkn.go.id/berita/instansi-pemerintah-wajib-mutakhirkan-data-pegawai-melalui-si-asn>
- Badan Kepegawaian Negara, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil. Diakses dari [https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2015/08/PERKA-BKN-NOMOR-14-TAHUN-2011\\_PEDOMAN-PENGEMBANGAN-DATABASE-PNS.pdf](https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2015/08/PERKA-BKN-NOMOR-14-TAHUN-2011_PEDOMAN-PENGEMBANGAN-DATABASE-PNS.pdf)
- Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, (2021). Peremajaan Data Mandiri ASN Nasional 2021, Segera Aktivasi Akun MySAPK. Diakses dari: <https://setjen.pu.go.id/bko/news/peremajaan-data-mandiri-asn-nasional-2021-segera-aktivasi-akun-mysapk> Pemeriksa Keuangan, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun

2019 tentang Satu Data Indonesia. Diakses dari  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/108813/perpres-no-39-tahun-2019>

Sufi, Wasiah, Dwi Herlinda. (2017). Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Berbasis Online Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru, E-Journal, Universitas Lancang Kuning. Diakses dari <https://jurnal.unilak.ac.id/index.php/nia/article/view/2103/1313> Skripsi, Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Diakses dari <http://eprints.umpo.ac.id/5520/>

Wijayanto, Hargo Dwi, (2019). Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan di Kabupaten Magetan. Skripsi (S1) thesis. Universitas Muhammadiyah Ponorogo. <https://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/5520>

Yani, Ahmad. (2017). Peranan Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Upaya Penanggulangan Banjir di Kota Binjai. Tesis, Medan: Universitas Medan Area. Diakses dari [http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1522/5/151801172\\_file%205.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1522/5/151801172_file%205.pdf)